

Pengaruh Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Refinaldi¹, Anton Arisman²

Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang

e-mail: *¹Repi_benga@yahoo.com, ²Ariman@stie_mdp.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel 95 responden Wajib Pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Teknik analisis data menggunakan analisis data linier berganda. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang berarti bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Kata Kunci : Penghapusan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak Badan

Abstract

The purpose of this study was to test the Administrative Sanctions Removal Effect on corporate taxpayer. This study uses a simple random sampling with a sample of 95 respondents in the corporate taxpayer KPP Palembang Ilir Barat. Data were analyzed using multiple linear data analysis. So $t_{count} > t_{table}$, which means that the Removal of Administrative Sanctions significantly influence taxpayer compliance.

Keyword: Elimination of Administrative Sanctions, taxpayer

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal utama yang sangat diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan dalam negeri. Realisasi pembangunan nasional sangat tergantung pada seberapa besar pendapatan suatu negara. Di Indonesia dan sebagian negara berkembang lainnya mengandalkan pajak sebagai sektor utama pendapatan negara sebagai sarana pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur Penghapusan sanksi administrasi pajak yaitu salah satu fasilitas yang disediakan negara. Kebijakan ini menjembatani antara ketentuan dalam KUP yang lama dengan KUP yang baru. Hal ini berarti tidak ada perubahan yang signifikan antara ketentuan perundang undangan yang lama dengan yang baru.

Tujuan utama yang mendasari dibuatnya penghapusan sanksi pajak adalah untuk memotivasi wajib pajak agar lebih jujur, patuh serta akurat dalam melaporkan kegiatan perpajakannya yang sebelumnya masih terjadi ke tidak patuhan terhadap peraturan yang

ada. Peraturan ini hanya berlaku pada periode tertentu saja dan tidak dilakukan setiap tahun.

Penghapusan sanksi pajak sangat bermanfaat bagi wajib pajak salah satunya yaitu tidak dikenakan bunga atas tunggakan pajak, tidak dilakukan pemeriksaan data data perpajakan serta mendapat perlindungan hukum pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007. Meskipun begitu, saat ini masih ada wajib pajak yang menolak pemanfaatan penghapusan sanksi pajak dengan berbagai alasan salah satunya yaitu terdapat keraguan dari wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu tujuan Penghapusan Sanksi Administrasi yaitu terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat terealisasi, maka bagaimanapun juga kendala-kendala tersebut harus dapat diatasi.

Dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta di Kota Palembang. Adapun judul dalam penelitian **“PENGARUH PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN(STUDI KASUS KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat)

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat).

2. LANDASAN TEORI

2.1 Definisi pajak

Pajak merupakan sumber utama kas negara, sehingga perlu di tingkatkan guna menciptakan dan membangun sarana publik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Menciptakan masyarakat yang patuh terhadap perpajakan adalah suatu hal yang sangat berperan penting dalam mensukseskan tujuan tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat harus diikuti dengan sarana yang mendukung, seperti peningkatan modernisasi administrasi sistem perpajakan seperti yang telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut atas Undang Undang
2. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
3. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.2 Definisi Wajib Pajak

“Menurut Mardiasmo (2006, h. 20),Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif”. Maksud dari kewajiban subjektif adalah wajib pajak yang dituju atas penguasaan perpajakan. Sedangkan kewajiban objektif adalah penghasilan yang dikenai pajak”.

2.3 Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya.

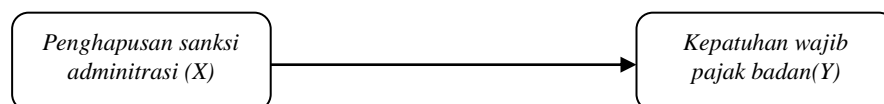
2.4 Penghapusan Sanksi Adminitrasi

Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidak benaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu “Pengaruh Penghapusan Sanksi Administrasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Widono (2007, h.120) penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang *fundamental* antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

3.2 Objek/Subjek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah *Probability Sampling*, dimana penulis menetapkan *Simple Random Sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya, karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dan anggota populasi di anggap homogen.

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan yang terdaftar sebagai PKP di KPP Ilir Barat Palembang yaitu sejumlah 1.937 Pengusaha Kena Pajak.

3.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 95 Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan sesuai masalah yang akan diteliti.

3.6 Definisi Operasional

Tabel 1 Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Penghapusan sanksi administrasi (X)	Bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Sumber: Pajak.go.id	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi denda pajak • Sanksi administrasi berupa bunga pajak • Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak • Sanksi pidana kurungan • Sanksi pidana penjara 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ordinal</i>

Kepatuhan wajib pajak badan (Y)	Suatu sikap dari wajib pajak badan untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik sanksi hokum maupun sanksi administrasi. Sumber: Pajak.go.id	<ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu • Tidak mempunyai tunggakan pajak • Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ordinal</i>
---------------------------------	---	---	--

Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jendral Pajak dengan menerapkan system Administrasi Perpajakan Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamatkan di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

KPP Pratama Palembang Ilir Barat memiliki wilayah kerja meliputi 6 (enam) kecamatan di Kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Sukarami, Alang-Alang Lebar dan Gandus, yang terdiri dari 324 Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 592.158 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 300.631 jiwa dan perempuan 291.527 jiwa. Luas wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah 190.730 km², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin
 Selatan : Sungai Musi
 Barat : Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin
 Timur : Kecamatan Ilir Timur I, Palembang

4.2 Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Penerapan *e*-SPT PPN

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Item 1	0.733	0.1996	Valid
Item 2	0.628	0.1996	Valid
Item 3	0.588	0.1996	Valid
Item 4	0.589	0.1996	Valid
Item 5	0.640	0.1996	Valid
Item 6	0.643	0.1996	Valid
Item 7	0.734	0.1996	Valid
Item 8	0.717	0.1996	Valid
Item 9	0.716	0.1996	Valid
Item 10	0.730	0.1996	Valid

Seluruh pertanyaan variabel Penerapan *e*-SPT PPN (X) dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil r-hitung dari 10 pertanyaan semuanya diatas r tabel yang sebesar 0.1996 ini menunjukkan semua pertanyaan sudah valid. Kevalidan ini dapat dilihat dari $[(sig.(2-tailed)] \leq \text{nilai } \alpha = 0,05$.

4.3 Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan *e*-SPT PPN Uji

Variabel	<i>Croanbach's Alpha Item</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Penghapusan Sanksi Administrasi (X)	0.707	0.6	Reliabel
<i>Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)</i>	0.692	0.6	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data yang Diolah, 2016

Dari tabel 2 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dari tiap variabel Penghapusan Sanksi Administrasi (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) lebih besar dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,6 yaitu 0,707 untuk variabel Penghapusan Sanksi Administrasi (X) dan 0,692 untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) berarti seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.4 Uji Normalitas

Tabel 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1.62518
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.066
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.713
Asymp. Sig. (2-tailed)		.689

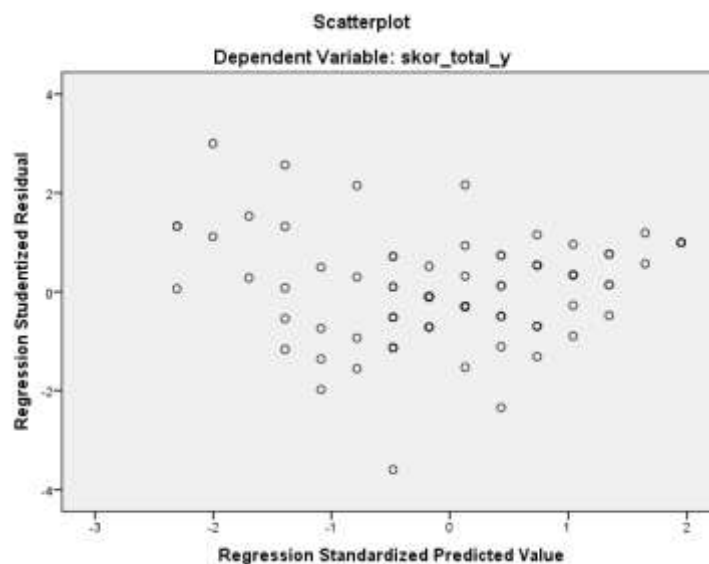
a. Test distribution is Normal.

b. User-Specified

Sumber :Data yang Diolah, 2016

4.5 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data yang Diolah, 2016

4.6 Uji *t*

Tabel 6 Hasil Uji *t*

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.755	1.221		7.172	.000
Penghapusan Sanksi Administrasi	.322	.051	.546	6.279	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Nilai *t* hitung variable Penghapusan Sanksi Administrasi (X) adalah sebesar 6.279 sedangkan *t* table dengan taraf $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 1.996. Nilai *t* table dicari dengan menggunakan table *t-student* (Syofian Siregar 2012, h. 404). Nilai *t* hitung variable Penghapusan Sanksi Administrasi (X) adalah 6.279 sedangkan *t* table dengan taraf (α) = 5%, $df = 95-1-1 = 93$ dengan menggunakan Ms. Excel dengan rumus =tinv(0.05,93) adalah sebesar 1,985801768.

Berdasarkan table pengujiannya, jika *t* hitung < *t* table maka *H*₀ diterima dan *H*_a ditolak, sedangkan jika *t* hitung > *t* table maka *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima. Pada penelitian ini *t* hitung 6.279 > *t* tabel 1.996, maka *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

4.7 Koefisien Determinasi (*R*²)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R*₂)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.546 ^a	.298	.290	1.634	1.586

a. Predictors: (Constant), Penghapusan Sanksi Administrasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Diperoleh nilai *R square* atau Koefisien Determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi oleh interaksi variable bebas dan variable terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 29,8% yang dapat ditafsirkan bahwa variable bebas Penghapusan Sanksi Administrasi (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 29,8% terhadap variable Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) dan 70,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor - faktor lain dalam variable Penghapusan Sanksi Administrasi (X).

5.KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Pengujian menyatakan H_0 diterima dan H_a ditolak apabila t hitung $< t$ tabel, sedangkan H_0 ditolak dan H_a diterima jika t hitung $> t$ tabel. Penelitian ini menghasilkan t hitung sebesar 6.279 lebih besar dari t tabel yaitu 1.999 maka dalam penelitian ini H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya. Penghapusan Sanksi Administrasi secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan karena Penghapusan Sanksi Administrasi dapat dilakukan secara cepat dan aman, data perpajakan terorganisasi dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat, kemudahan dalam membuat laporan pajak, efisiensi dalam melaporkan pajak, kemudahan dalam mengetahui lebih bayar atau kurang bayar secara akurat.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas adapun saran - saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Penelitian ini diharapkan akan menjadi pandangan terhadap KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk lebih meningkatkan kepatuhan yang diberikan kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan seperti memberikan sosialisasi – sosialisasi tentang pajak yang berfungsi memberikan motivasi bagi Wajib Pajak dan tata cara pelaksanaan pajak, dan untuk lebih menekankan fungsi pajak itu sendiri. Kemudian disarankan kepada petugas KPP Pratama Palembang Ilir Barat agar dapat memberikan masukan – masukan kepada Wajib Pajak atas keluhan mereka yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem di kemudian hari.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan, juga disarankan untuk menambah variabel Persepsi Penghapusan Sanksi Administrasi, kebijakan, dan dampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S 2011, *Metodologi Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumiyati 2009, *Pengaruh persepsi wajib pajak badan atas sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama*, Bandung cibeunying.
- Soraya 2010, *Penerapan sunset policy dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama*, Jakarta cilandak.
- Chairunesia 2010, *Analisis Dampak Kebijakan Sunset Policy terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama*, Tangerang Timur.
- Novelia 2009, *Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Kota Depok*.
- Susanti 2011, *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama*, Jember.
- , Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2013, Diakses pada 20 September 2016, <http://www.ortax.org>.
- , Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009, Diakses pada 20 September 2016, <http://www.ortax.org>.
- , Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2008, Diakses pada 20 September 2016, <http://www.ortax.org>.
- Mardiasmo 2006, *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2007.
- Priyatno, D 2014, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*, Andi, Yogyakarta.
- Resmi, S 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiana dkk 2011, *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung